

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DALAM MENCEGAH
BENCANA BANJIR DI PROVINSI MALUKU
(Studi Kasus Di Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur)**

Sitti Awalia Syarif

NPP. 29.1658

*Asdaf Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: awlsyrf24@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the fact that forest destruction in Maluku province still often occurs every year caused by unscrupulous entrepreneurs and the community through illegal logging or illegal logging activities, illegal logging activities will have an impact on the loss of forest functions so that it can lead to the loss of forest functions.

Porpuse: The purpose of this research is to find out how the Tasks and Functions of the Forestry Service Execute in Preventing Flood Disasters in Maluku Province, as well as to find out what are the factors that hinder the forestry service in carrying out its duties, and what efforts are being made by the Department of Forestry. Maluku Province Forestry in overcoming the factors that become obstacles.

Method:The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The informants in this study were employees of the Maluku Provincial Forestry Service with purposive sampling technique. Data collection techniques were carried out by means of direct interviews with semi-structured techniques, observations and documents.

Result: The results of the study show that the implementation of the tasks and functions of the Forestry Service Office in Preventing Flood Disasters in Maluku Province has reached a maximum of 2,000 ha. This can be seen from every dimension in the study which only has a few shortcomings and this can be attempted to be overcome by the Maluku Provincial Forestry Service..

Conclusion: The results of the analysis concluded that the implementation of the tasks and functions of the Forestry Service in Preventing Flood Disasters in Maluku Province was maximal. Barriers that come from outside and inside can also be overcome with the efforts made. Based on these conclusions, the researchers provide suggestions for the Government and the Forestry Service so that there is a need for re-improvement and evaluation of the obstacles that hinder the implementation of tasks and functions in preventing flood disasters in Maluku province.

Keywords: Implementation, Forestry Service, Flood, Maluku Province

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena kerusakan hutan di provinsi Maluku masih sering terjadi setiap tahunnya yang disebabkan oleh oknum pengusaha maupun masyarakat melalui kegiatan *illegal logging* atau pembalakan hutan secara liar, kegiatan *illegal logging* akan berdampak pada hilangnya fungsi hutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya berbagai ancaman bencana seperti banjir.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Dalam Mencegah Bencana Banjir di Provinsi Maluku, serta mengetahui apa saja faktor yang menghambat dinas kehutanan

dalam pelaksanaan tugasnya, dan upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang ada dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Maluku teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan teknik semiterstruktur, observasi dan dokumen. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dalam Mencegah Bencana Banjir Di Provinsi Maluku sudah maksimal. Hal ini dapat dilihat dari setiap dimensi yang ada dalam penelitian yang hanya sedikit memiliki kekurangan dan hal itu pun dapat diupayakan untuk diatasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. **Kesimpulan:** Hasil analisis diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dalam Mencegah Bencana Banjir di Provinsi Maluku sudah maksimal. Hambatan yang berasal dari luar maupun dalam juga sudah dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran yaitu untuk Pemerintah dan Dinas Kehutanan agar perlu adanya perbaikan kembali dan evaluasi terhadap kendala yang menjadi penghambat Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencegah bencana banjir di provinsi Maluku.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Dinas Kehutanan, Banjir, Provinsi Maluku

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, Pembalakan liar (*illegal Logging*) adalah seluruh kegiatan terorganisasi dalam pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah. Beberapa penyebab yang melatar belakangi kegiatan penebangan pohon secara liar (*illegal logging*) diantaranya yaitu kebutuhan industry yang tinggi dan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang. Dampak yang ditimbulkan yaitu hilangnya fungsi hutan diantaranya adalah fungsi hutan sebagai penahan pergerakan tanah dan penampung air saat turun hujan sehingga akan memicu ancaman bencana banjir. Banjir adalah salah satu peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air merendam suatu daratan yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah akibat ulah manusia.

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mengaku kewalahan menangani dan mencegah kasus penebangan liar (*illegal logging*) di provinsi Maluku, Salah satu pulau di provinsi Maluku yang sering terjadi eksploitasi hutan dan penebangan liar (*illegal logging*) adalah pulau Seram (Kabar Timur.com). Pulau Seram adalah salah pulau terbesar di provinsi Maluku dengan presentase luas wilayah sekitar 36.52% dari total luas wilayah pulau di Provinsi Maluku, pulau Seram sendiri terbagi menjadi 3 Kabupaten diantaranya Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur Kelian, Abdullah (2020). Pulau seram menjadi salah satu pulau yang paling banyak kasus eksploitasi hutan baik yang di lakukan secara legal maupun illegal. Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa pulau seram merupakan pulau yang paling sering terjadi kasus penebangan secara liar atau *Illegal Logging* selama 6 tahun terakhir. Salah satu kasus yang masih baru adalah di Kabupaten seram bagian timur. Kegiatan tersebut terjadi di kecamatan siwalalat, sehingga dari permasalahan tersebutlah peneliti menjadikan menjadikan kecamatan siwalalat sebagai studi kasus .

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini seperti bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kehutanan dalam mencegah bencana banjir di provinsi Maluku yang mana masih sering terjadi kasus eksploitasi hutan di provinsi Maluku baik eksploitasi hutan secara berlebihan maupun

penebangan secara liar (*Illegal Logging*), kemudian terdapat beberapa faktor penghambat yang di hadapi oleh Dinas Kehutanan saat pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencegah bencana banjir di provinsi maluku serta upaya yang dilakukan oleh dinas provinsi Maluku untuk mencegah faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dalam mencegah bencana banjir di provinsi Maluku

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi maupun konteks pencegahan bencana banjir. Penelitian Fazriah Amfar, Adwani, Mujinusalam berjudul Pelaksanaan tugas dan fungsi panglima laut di kota Sabang, menemukan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi panglima laut masih berjalan belum baik, karena masih ada yang melakukan pelanggaran dan panglima laut bertanggung jawab untuk mengatur tata cara penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak merusak ekosistem laut. Penelitian Muh. Ashar AZ, A. Muin Fahmal dan Muhammad Kamal berjudul Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Maros, menemukan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Maros kurang optimal. Faktor yang mempengaruhi adalah: Kualitas SDM, Sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat. Penelitian Rida Putri Lidya berjudul Peran Manajemen Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Perspektif Islam menemukan bahwa Islam yang mengajarkan sikap proaktif daripada sikap reaktif menjadikan suatu masyarakat lebih waspada dan melakukan mitigasi. Sehingga jika terjadi bencana dapat diantisipasi terlebih dahulu dan mengurangi resiko korban. Islam juga mengajarkan untuk saling bantumembantu antara sesama manusia sehingga jika setelah terjadi bencana maka mereka akan saling membantu dalam melakukan pemulihan beberapa hal tersebut sama seperti yang telah diterapkan oleh BPBD Kab Aceh Tamiang.

1.4 Pernyataan Kebaruan

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan modifikasi dan teori yang lebih sedikit lebih kompleks, dimana penelitian dimana penelitian pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kehutanan dalam mencegah bencana banjir. Dimana penelitian melaksanakan tugas dan fungsi dinas kehutanan dalam mencegah bencana banjir meliputi faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi penghambat dan upaya yang dapat dilakukan oleh dinas kehutanan untuk mencegah bencana banjir di provinsi Maluku khususnya di kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram bagian timur. Penelitian ini menggunakan teori George R. Terry Tentang Prinsip-Prinsip Manajemen Untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kehutanan dalam mencegah bencana banjir di provinsi Maluku terlaksana dengan maksimal atau tidak.

1.5 Tujuan.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutan dalam mencegah bencana banjir di Provinsi Maluku, faktor penghambat apa saja yang di hadapi oleh Dinas Kehutanan saat pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencegah bencana banjir di Provinsi Maluku, dan upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan untuk mengatasi faktor yang menghambat Dinas Kehutanan saat pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencegah bencana banjir di provinsi Maluku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012), sumber data dan informan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder,

informan penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan benar terkait permasalahan dalam penelitian ini. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal apabila manajemen yang ada juga baik, sehingga dalam penelitian ini menggunakan teori daftar purge R. Terry tentang Fungsi-Fungsi Manajemen yang diantaranya adalah Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Evaluasi (*controlling*).

3.1 Perencanaan (*Planning*)

a. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan merupakan tahap awal dari sebuah perencanaan jika tujuan yang dimiliki sudah jelas maka keinginan untuk mencapai tujuan tersebut akan ada. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku (Ir. Sadli Ie M.Si) pada hari Senin, 10 Januari 2022 pukul 09:02 dapat disimpulkan bahwa tujuan atau arah yang ditetapkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku adalah pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Misi ketiga pemerintahan Maluku.

Tabel 3. 1 Sasaran Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

NO	PROGRAM	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase penurunan luas lahan kritis	13,5 %
2	Program peningkatan pengelolaan hutan, kawasan hutan dan potensi sumber daya hutan	Meningkatnya pengelolaan hutan, kawasan hutan dan potensi sumber daya hutan	Jumlah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)	9 unit
			Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)	62 unit
			Volume produksi kayu bulat	260.000M2
			Jumlah dana perimbangan dari pungutan PSDH-DR	Rp. 3.000.000.000
			Jumlah pemberdayaan masyarakat di sekitar / dalam kawasan hutan	20 lokasi
3	Program peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan	Meningkatnya pengelolaan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan	Jumlah kasus perambahan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan/illegal logging	Menurun
4	Program perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	persentase program yang tercapai 100%	100%

Sumber: LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

b. Membuat Rencana Tindakan

Rencana tindakan berarti bagaimana Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam membuat atau menyusun langkah-langkah yang efektif dari program atau kebijakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan menjelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dari program Dinas Kehutanan. Salah satu kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan bencana banjir adalah kegiatan rehabilitasi lahan kritis. Lahan kritis yang telah direhabilitasi adalah sebanyak 7% dengan capaian kinerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebanyak 13,5%. Tentu tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena terjadi Rasionalisasi Anggaran sehingga mengakibatkan minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan RHL yang diterima oleh Dinas Kehutanan juga menyebabkan target kinerja yang ditetapkan tidak dapat dicapai 100%”.

Penulis menyimpulkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku bahwa program peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan belum seluruhnya dilaksanakan hal ini dikarenakan terkendalanya alokasi anggaran dan luasnya lahan kritis yang direhabilitasi.

c. Evaluasi Kemajuan

Evaluasi kemajuan merupakan salah satu tanda sejauh mana Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencegah bencana banjir, untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku bapak Ir. Sadli Ie M.Si menurut beliau bahwa sejauh ini program dan kegiatan Dinas Kehutanan sudah berjalan dengan baik dan berjalan seluruhnya dapat dilihat dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021. Salah satu programnya yaitu program rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan Kampanye Penyadaran Publik Pelestarian DAS (FMSRB) telah terlaksana. Kegiatan ini dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk mengingatkan kepada masyarakat agar dapat menjaga pelestarian daerah aliran sungai dan tidak merusak daerah aliran sungai supaya terhindar dari berbagai ancaman bencana banjir maupun longsor.

3.2 Organizing (pengorganisasian)

a. Pembagian Kerja (Division of work)

Menurut Stephen P. Robbins (2008:215) Pembagian kerja digunakan untuk menggambarkan sejauh mana berbagai kegiatan dalam organisasi dibagi-bagi menjadi beberapa pekerjaan tersendiri yaitu pekerjaan itu dipecah-pecah menjadi sejumlah tahap, dengan masing-masing tahap diselesaikan oleh seorang individu tersendiri. Siti Al-Fajar dan Triheru (2010:22) mengemukakan bahwa ada beberapa indikator dari pembagian kerja antara lain:

- Lingkungan Fisik Pekerjaan

Berdasarkan Hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa lingkungan fisik Dinas Kehutanan Provinsi Maluku bisa dikatakan kurang nyaman hal ini dapat menjadikan kurangnya semangat dan produktifnya pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kehutanan tidak terlaksana dengan maksimal.

- Jadwal Kerja Alternatif

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku memiliki patokan jam kerja yang tertuang pada UU No. 13/2003 dalam pasal 77 sampai dengan 85. Dimana Bagi para pekerja yang bekerja 6 hari dalam seminggu memiliki jam kerja 7 jam per hari, jadi 40 jam per minggunya namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya akan ada waktu tambahan atau lembur. Penulis menyimpulkan bahwa jadwal kerja alternative dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku memiliki acuan yang jelas sehingga pegawai tidak dapat mengelak dan wajib untuk dilaksanakan.

- Aspek Legalitas

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tidak terpengaruh akan aspek ini dikarenakan di Maluku sendiri tidak ada peraturan seperti yang disebutkan.

- Pasar Tenaga Kerja

Dinas Kehutanan dalam melakukan perekrutan dan penerimaan pegawai yang akan bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai dengan kebutuhan yang ada di kantor dan untuk keahlian sudah sesuai dengan keahliannya masing-masing dengan rata-rata pegawai merupakan sarjana Kehutanan.

b. Pengelompokan Pekerjaan di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Pengelompokan Pekerjaan bertujuan untuk penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jika pengelompokan pekerjaan yang dilakukan berhasil maka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kehutanan akan berjalan dengan sesuai atau efektif dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, pada tanggal 10 Januari Dinas Kehutanan dalam melakukan pengelompokan pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik dimana setiap bidang bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jika setiap orang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing maka dinas akan berjalan dengan baik sehingga tujuan yang akan dicapai akan menjadi jauh lebih mudah untuk dicapai.

c. Penentuan Mekanisme Dalam Mengintegrasikan Aktivitas Antarbagian Dalam Organisasi

Kriteria yang juga penting dalam pengorganisasian adalah penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antarbagian dalam organisasi atau yang disebut dengan koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Kehutanan dan kepala bidang perlindungan Hutan, penyuluhan dan pemberdayaan dapat dipahami bahwa Dinas Kehutanan melakukan koordinasi dengan berbagai bidang untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Dengan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi seperti salah satunya adalah kepolisian untuk melakukan pengamanan hutan dapat menjadikan hutan yang lebih aman dari pengrusak-pengrusak hutan sehingga hutan akan terjaga maka berbagai bencana juga dapat dicegah.

3.3 Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan atau pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan pelaksanaan atau pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Pelaksanaan tugas fungsi dikatakan terlaksana jika program-program yang direncanakan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dinas Kehutanan memiliki 4 program strategis yang telah dibuat namun dalam hal ini penulis hanya membahas 3 program yang berhubungan dengan judul penulis yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam mencegah bencana banjir. Ketiga program tersebut diantaranya Program Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, Program peningkatan pengelolaan hutan, kawasan hutan dan potensi sumber daya hutan, dan Program peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan.

a. Pelaksanaan Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan untuk mencegah bencana banjir diprovinsi Maluku

Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dibuat untuk memperbaiki lahan kritis baik akibat faktor alam maupun faktor non alam seperti perbuatan manusia.

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

No	Sasaran strategi	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan lahan	Penurunan luar lahan kritis	%	13,5%	7,25%	51,85

Sumber: LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Dengan jumlah anakan yang disediakan sebanyak 352.778 anakan untuk realisasi luas tanam 435 ha (7,25%) dari target capaian 820 ha (13,5% dari target tahunan 6.000 ha) yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan hutan rakyat, rehabilitasi hutan mangrove, reboisasi pengkayaan, penanaman turus jalan dan seremonial perempuan tanam dan pelihara pohon serta puncak aksi pananaman pohon di Provinsi Maluku, serta permintaan bibit untuk kegiatan penanaman oleh instansi/badan/LSM/ Stakholder terkait.

b. Pelaksanaan Program Peningkatan Pengelolaan Hutan, Kawasan Hutan dan Potensi Sumber Daya Hutan

Selain program rehabilitasi hutan dan lahan program peningkatan pengelolaan hutan kawasan hutan dan potensi sumber daya hutan juga tidak kalah pentingnya dalam upaya pencegahan bencana banjir. jika ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu meningkat tentu ini menggambarkan bahwa adayan kemajuan untuk menurunkan penebangan secara illegal atau pemanfaatan secara illegal. Untuk mendapatkan izin tentu ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi yang salah satunya adalah membayar iuran yang telah ditentukan. Iuran ini berfungsi jika diekmdudian hari terjadi kejadian kerusakan hutan akibat perbuatan pelaku usaha maka dinas kehuatan dapat segera mengatasinya menggunakan uang dari hasil iuran tersebut.

Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Kayu

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Kawasan hutan dan potensi sumber daya hutan	Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Unit IUPHHK	9	13	144

Sumber: LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Dapat dilihat dari tabel diatas yang seharusnya 9 unit yang ditargetkan untuk dicapai justru dalam pelaksanaannya mencapai 13 unit sehingga hasil yang dicapai adalah mencapai 144% .

d. Pelaksanaan Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Peningkatan perlindungan hutan dan konservasi hutan dan lahan lebih pada langkahpencegahan pengrusakan hutan.

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Penyelesaian Kasus Perambahan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan *Illegal Logging*

No	Sasaran Strategis	Indicator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan lahan	Berkurangnya perambahan hutan, kawasan hutan dan hasil	Lokasi	11 kab/kota	9 kab/kota	100 (menurun)

		hutan (illegal logging)				
--	--	-------------------------	--	--	--	--

Sumber: LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian program Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan lahan pada tahun 2021 mencapai 80%. Faktor yang menyebabkan tidak mencapainya 100% adalah karena Dinas Kehutanan kekurangan SDM, anggaran dan sarana Prasarana yang mana sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kepala bidang perlindungan , penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan adat.

3.4 Controlling (Pengawasan/Evaluasi)

Evaluasi adalah suatu proses untuk melihat, mempertimbangkan atau menilai informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan yang telah dicapai dan bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu sehingga dapat mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya. Menurut George R. Terry bahwa fungsi controlling dalam manajemen adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan 2019 Dalam tahun anggaran 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku melaksanakan 6 program dengan 30 kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku. Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 17 kegiatan pada tahun 2019 (36,17%). Dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan (47 kegiatan) tahun 2019, terlihat bahwa realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 sebesar 91,24% mengalami penurunan sebesar 0,92 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 92,16%. Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun Terakhir:

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Lima Tahun Terakhir

NO	TAHUN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	2015	9	31	90,29
2.	2016	8	28	94,58
3.	2017	6	23	95,88
4.	2018	6	30	92,16
5.	2019	6	49	91,24
	Rata-Rata	7	32	92,83

Sumber: LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja per tahun OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku adalah sebesar 92,83% yang mana menurut penulis ini sudah baik yang jika dilihat dari tahun ketahun selau menginjak diatas angka 90.

3.5 Faktor Penghambat Yang di Hadapi Oleh Dinas Kehutanan

Berjalannya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Kehutanan Dalam Mencegah Bencana Banjir Di Provinsi Maluku tentu memiliki faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1). Anggaran, 2). Sarana dan Prasarana, dan 3). Terbatasnya Sumber Daya Manusia

3.6 Upaya Dinas Kehutanan untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya dalam Mencegah Bencana Banjir di Provinsi Maluku

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsinya untuk mencegah bencana banjir di Provinsi Maluku tentu tidak dibiarkan dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Maluku memiliki upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut diantaranya adalah: 1). Melakukan Pembinaan Teknis Kepada Pegawai, 2). Melakukan koordinasi dan 3). Pemberdayaan Masyarakat Adat.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan sangat penting untuk memelihara hutan dari kerusakan yang dapat memicu terjadinya ancaman bencana seperti longsor, maupun banjir. Pelaksanaan dapat dikatakan berjalan dengan maksimal apabila manajemen yang dibuat berjalan dengan maksimal, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan. Dalam penelitian Rida Putri Lidya yang berjudul Peran Manajemen BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Perspektif Islam menemukan bahwa Islam yang mengajarkan sikap proaktif daripada sikap reaktif menjadikan suatu masyarakat lebih waspada dan melakukan mitigasi. Sehingga jika terjadi bencana dapat diantisipasi terlebih dahulu dan mengurangi resiko korban. Islam juga mengajarkan untuk saling bantumembantu antara sesama manusia sehingga jika setelah terjadi bencana maka mereka akan saling membantu dalam melakukan pemulihan beberapa hal tersebut sama seperti yang telah diterapkan oleh BPBD Kab Aceh Tamiang. Dari hasil temuan tersebut dapat dilihat bahwa Manajemen yang dilakukan oleh BPBD sudah maksimal dan berjalan dengan baik dalam menekan terjadinya bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Sama halnya dengan penelitian peneliti, yang mana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Dalam Mencegah Bencana Banjir di Provinsi Maluku sudah berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari teori yang menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian ini, yaitu fungsi-fungsi Manajemen yang mana Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan tugasnya sudah sesuai dengan setiap dimensi dan indikatornya dan hanya terdapat sedikit kekurangan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan sudah maksimal.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan dengan melakukan pembinaan teknis kepada pegawai maka pegawai yang dinas kehutanan akan bekerja lebih maksimal, inovatif dan kreatif sehingga dapat membantu mengurangi pengeluaran anggaran, maupun mengatasi masalah yang perlu kerjasama maupun lainnya .

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam Mencegah Bencana Banjir di Provinsi Maluku khususnya di Kecamatan Siwalalat sudah maksimal namun ada beberapa kendala yang masih harus dievaluasi untuk kemudian diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari setiap indikator yang mengukur masing-masing dimensi dalam penelitian ini, yang masih memiliki sedikit kekurangan karena beberapa hambatan seperti: anggaran, terbatasnya sumber daya manusia dan terbatasnya sarana dan prasarana. Kemudian dari hambatan tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Maluku melakukan berbagai upaya seperti, melakukan pembinaan terhadap pegawai, melakukan koordinasi dan melakukan pemberdayaan masyarakat adat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dalam mencegah bencana banjir untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

AZ, Muh Ashar, Dkk "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Berdasarkan Undang-Undang Nomor eliforElis, Arif aslin. 2021. "Aktifitas PT. Tiga Ikan dan CV. SBM Dituding Jadi Penyebab Banjir Siwalalat – Rakyat Maluku." *RakyatMaluku.com*. Diambil 16 September 2021 (<http://rakyatmaluku.com/aktifitas-pt-tiga-ikan-dan-cv-sbm-dituding-jadi-penyebab-banjir-siwalalat/>).

George.R.Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J. Smith, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) Kabartimur. 2020. "Illegal Logging, Fence Purimahua Divonis 1 Tahun – Kabartimurnews.com." Diambil 26 September 2021 (<https://www.kabartimurnews.com/2020/05/20/illegal-logging-fence-purimahua-divonis-1-tahun/>).

Kelian, Abdullah. 2020. "Analisis Yuridis Kewenangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku." *skripsi*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2021

LenteraMaluku. 2019. "Eksplorasi Hutan Adat, Garda NKRI Maluku Tuntut PT. Maluku Sentosa | kumparan.com." Diambil 26 September 2021 (<https://kumparan.com/lenteramaluku/eksplorasi-hutan-adat-garda-nkri-maluku-tuntut-pt-maluku-sentosa-1s1Q52mcHAb>).

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tahun 2021

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan